

**PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN REHABILITASI HUTAN DI KPHL BATU TEGI
(STUDI KASUS KELOMPOK TANI HUTAN MARGO RUKUN DAN
HARAPAN SENTOSA)**

(Skripsi)

oleh

**Kadek Wikan Nandini
1814151067**



**JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

COMMUNITY PERCEPTION AND PARTICIPATION IN FOREST REHABILITATION PLANNING IN KPHL BATU TEGI (Case Study Margo Rukun and Harapan Sentosa Forest Farmer Group)

by

KADEK WIKAN NANDINI

In supporting the policies of community empowerment in and around forest areas, development activities and community empowerment are carried out, one of which is through the development of Community Forests. However, to reduce the impact of degradation due to community forest management, it is necessary to carry out rehabilitation activities. The implementation of rehabilitation is one of the efforts to restore damaged forest areas. In order to support the sustainability of the rehabilitation program, the planning needs to be carried out beforehand. The planning activities themselves are closely related to the implementation of the rehabilitation program, namely the community, including community forest (HKm) members. Efforts to rehabilitate land must actively involve the community. Efforts to restore the condition and function of land so that it can be productive again that actively involve the community in its management and handling to the fullest is called community-based land rehabilitation. This study focuses on HKm group, precisely in Margo Rukun and Harapan Sentosa forest farmer group in their role in forest rehabilitation planning, both in terms of perception and participation. The purpose of this study is to identify the level of correlation

between perceptions and participation of community members of Margo Rukun and Harapan Sentosa forest farmer group in planning for forest rehabilitation.

The analytical method used in this research is a qualitative descriptive analysis. Primary data was collected using a questionnaire instrument, then secondary data was obtained through a literature study. Data analysis on the level of perception and participation was obtained by using the likert scale analysis method, then to identify the correlation between the level of perception and community participation in forest rehabilitation planning was obtained by using the Spearman Rank analysis method.

Farmers' perceptions of forest rehabilitation planning activities in Margo Rukun and Harapan Sentosa forest farmer group are quite high. It can be seen from the number of highest scores found in the opinion very agree with a total score of 942, as well as the level of perception in Harapan Sentosa Forest Farmer Group with the highest score in the opinion very agree with score 1997. The level of participation in Margo Rukun and Harapan Sentosa forest farmer group also high. It can be seen from the highest score in Margo Rukun was in category very often with score 1008 as well as Harapan Sentosa with score 1293. The correlation between perception and participation in Margo Rukun has significance level score 0.000 which is lower than 0,050 that means there is a correlation between perception and participation variables. It was also found that the coefficient correlation is 0,518 and positive which means the variables have a strong correlation and undirectional. The level of perception and community participation had a high correlation so that the success of planning the rehabilitation program went well. The correlation between perception and participation in Harapan Sentosa has significance level score 0,570 which is lower than 0,050 that means there is no significant correlation between perception and participation variables.

Keywords: Forest Rehabilitation, Forest Planning, Community Perception, Community Participation

ABSTRAK

PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN REHABILITASI HUTAN DI KPHL BATU TEGI (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa)

oleh

KADEK WIKAN NANDINI

Pembangunan kawasan hutan dapat berjalan dengan optimal jika didukung kegiatan pembangunan yang disertai pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Untuk mengurangi dampak degradasi akibat pengelolaan hutan di areal HKm perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak dan perlu dilakukan perencanaan secara cermat terlebih dahulu. Kegiatan perencanaan rehabilitasi penting dalam pelaksanaan programnya karena perencanaan merupakan langkah awal dalam proses mencapai tujuan. Upaya pemulihan kondisi dan fungsi lahan melalui kegiatan rehabilitasi agar dapat produktif kembali harus melibatkan masyarakat secara aktif, terlebih untuk program rehabilitasi di areal HKm. Pelaksanaan HKm akan mencapai hasil yang baik jika masyarakat mempunyai persepsi dan partisipasi yang baik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 dan berfokus pada kelompok HKm KPHL Batu Tegi, tepatnya di kelompok tani hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa. Dilakukan penelitian tentang peran masyarakat dalam perencanaan rehabilitasi hutan, baik dari segi persepsi maupun partisipasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat kelompok tani hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa dalam perencanaan rehabilitasi hutan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan rehabilitasi hutan diperoleh dengan menggunakan metode analisis *Rank Spearman*. Nilai persepsi petani tentang kegiatan perencanaan rehabilitasi hutan di kelompok tani hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa sangat tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah skor tertinggi (total 942) pada pendapat sangat setuju tentang perencanaan rehabilitasi hutan. Adapun tingkat persepsi terhadap perencanaan rehabilitasi hutan pada Kelompok Tani Hutan Harapan Sentosa dengan skor tertinggi pada pendapat sangat setuju memiliki skor 1197. Tingkat partisipasi dalam kelompok tani hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa juga tinggi, terlihat dari skor tertinggi pada Kelompok Tani Margo Rukun berada pada kategori sangat sering dengan skor 1008. Demikian pada KTH Harapan Sentosa yang mempunyai skor sebesar 1293. Korelasi antara persepsi dan partisipasi dalam Margo Rukun memiliki tingkat signifikansi skor 0,000 yang lebih rendah dari 0,050, artinya ada hubungan antara variabel persepsi dengan partisipasi. Ditemukan juga koefisien korelasi sebesar 0,518 dan positif yang berarti variabel-variabel tersebut mempunyai korelasi yang kuat dan searah. Tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat tentang perencanaan rehabilitasi hutan memiliki korelasi yang tinggi sehingga keberhasilan perencanaan program rehabilitasi berjalan dengan baik. Korelasi antara persepsi dan partisipasi di Harapan Sentosa memiliki tingkat signifikansi skor 0,570 yang lebih tinggi dari 0,050 yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel persepsi dan partisipasi.

Kata Kunci: Perencanaan Rehabilitasi, Perencanaan Hutan, Persepsi Masyarakat

**PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN REHABILITASI HUTAN DI KPHL BATU TEGI
(Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa)**

oleh

Kadek Wikan Nandini

Skripsi

**sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN**

pada

**Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : PERSEPSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
REHABILITASI HUTAN DI KPHL BATU
TEGI (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan
Margo Rukun dan Harapan Sentosa)

Nama Mahasiswa : Kadek Wikan Nandini


Nomor Pokok Mahasiswa : 1814151067


Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

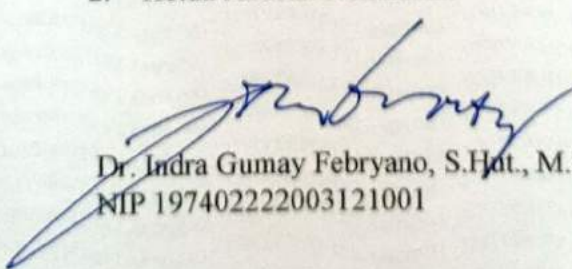
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M. P.
NIP 196412261993032001


Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.
NIP 196906011998021002

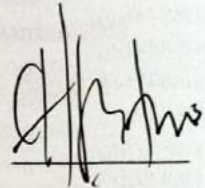
2. Ketua Jurusan Kehutanan


Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
NIP 197402222003121001

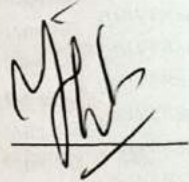
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

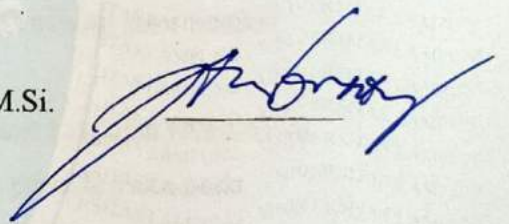
Ketua Komisi : Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M. P.



Anggota : Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.



Anggota : Dr. Indra Gumay F, S.Hut., M.Si.



Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M. Si.
NIP. 198110201986031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Januari 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kadek Wikan Nandini
NPM : 1814151067
Jurusan : Kehutanan
Alamat Rumah : Jl. Mangris Blok TM 4 No. 3 BTN 3 Way Halim,
Bandarlampung

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Rehabilitasi Hutan di KPHL Batu Tegi (Studi Kasus Kelompok Tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa)”

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



Kadek Wikan Nandini
NPM 1814151067

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung, 26 April 2000 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Bapak I Wayan Wisanta dan Ibu Ni Made Nurhayati. Penulis menempuh pendidikan di TK Xaverius Way Halim, pada tahun 2004 – 2006, SD Xaverius 3 Bandar Lampung pada tahun 2006 – 2012, SMP Fransiskus Tanjung Karang pada tahun 2012-2015, dan SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2015 – 2018. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa *English Society* (ESo) sebagai Sekertaris Umum selama 1 periode yaitu pada periode 2021 juga dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan sebagai anggota pada tahun 2018 dan 2019. Penulis pernah menjadi Asisten Dosen pada mata kuliah Bahasa Inggris pada tahun 2019 serta Pengelolaan Jasa Lingkungan pada tahun 2021 dan 2022. Penulis aktif mengikuti lomba non akademik dimana pada tahun 2020 mendapatkan juara 1 pada perlombaan *Speech* tingkat nasional yang diadakan oleh STIE Jakarta International College. Selain itu penulis pernah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi peringkat kedua di Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tahun 2021.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Januari – Februari

2021. Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Umum di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur pada bulan Agustus 2021 selama 20 hari. Penelitian penulis dipublikasikan secara online dalam Prosiding Seminar Internasional *Istanbul International Modern Scientific Research Congress - II* yang diadakan pada tanggal 23 – 25 Desember 2021 dengan judul *Specific Forest Rehabilitation Planning by Community Forest Group (HKm) in Lampung Province, Indonesia* dan Prosiding Seminar Internasional *ISPEC-IX Agriculture, Animal Sciences and Rural Development* pada tanggal 19 – 20 Maret 2022 dengan judul *Forest rehabilitation planning by community forest (HKm) group in lampung province, Indonesia*.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk dua orang yang sangat berharga
dan tercinta Ayah dan Ibu.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Rehabilitasi Hutan di KPHL Batu Tegi (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung sekaligus selaku dosen penguji atas arahan, saran dan kritik yang telah diberikan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P. selaku dosen pembimbing pertama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut, M.P. selaku dosen pembimbing kedua atas kesediaannya memberikan bimbingan, motivasi, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Surnayanti, S. Hut. M. Si. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama masa perkuliahan.

6. Segenap dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang kehutanan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
 7. Segenap dosen yang tergabung dalam tim percepatan Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung yang telah memberikan motivasi serta arahan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. PT. Nestle Indonesia yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
 9. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutege yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
 10. Kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa yang telah membantu dalam penelitian dan membantu penulis dalam pengambilan data.
 11. Orang tua penulis, Bapak I Wayan Wisanta dan Ibu Ni Made Nurhayati yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang penuh kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan kuliah tingkat sarjana.
 12. I Putu Duta Krisna Dvaipayana A.Md. Kbn. yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 13. Sahabat – sahabat penulis, Dhea Avinda Lase, Putri Nur Syamsia, Rasyidah Amany, Mira Amelda Wati dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 (Corsyl), yang mewarnai lika-liku kehidupan di bangku perkuliahan.
 14. Seluruh keluarga besar Himasyilva semoga kebersamaan, kekeluargaan, dan tali silaturahmi dapat terus terjalin dengan baik.
 15. Serta semua pihak yang telah andil dalam memberikan pengalaman berharga bagi penulis yang dengan sangat menyesal, tidak dapat dituliskan satu per satu.
- Semoga selalu diberkahi dan berada dalam lindungan Tuhan YME. Dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Kadek Wikan Nandini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Kerangka Pemikiran.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kondisi Umum KPHL Batutegi	6
2.2. Perhutanan Sosial	16
2.3. Deforestasi	23
2.4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	24
2.5. Gabungan Kelompok Tani Hutan	24
2.6. Persepsi	26
2.7. Partisipasi	29
2.8. Pemberdayaan Masyarakat	30
2.9 Analisis Korelasi	30
2.10 Analisis Regresi	31
III. METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1. Waktu dan Tempat	36
3.2. Alat dan Objek Penelitian	37
3.3. Rancangan Penelitian	37
3.3.1. Teknik Penentuan Responden.....	37
3.3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.3.4 Analisis Data.....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Karakteristik Responden	42
4.2. Tingkat Persepsi di Margo Rukun dan Harapan Sentosa.....	46
4.3 Tingkat Partisipasi di Margo Rukun dan Harapan Sentosa	51
4.4. Tingkat Korelasi antara Persepsi dan Partisipasi Perencanaan Rehabilitasi Hutan Gapoktan Margo Rukun	55

4.5. Tingkat Korelasi antara Persepsi dan Partisipasi Perencanaan Rehabilitasi Hutan Gapoktan Harapan Sentosa	56
V. SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Simpulan	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	5
2. Peta Wilayah Kelola KPHL Batu Tegi (Sumber : RPHJP Batutegi)	10
3. Peta lokasi KPHL Batutegi	37
4. Diagram karakteristik kelompok tani Margo Rukun (a) Jenis kelamin, (b) Usia, (c) Pekerjaan utama.....	43
5. Diagram karakteristik kelompok tani Margo Rukun (a) pekerjaan sampingan, (b) Pendidikan akhir, (c) Luas lahan HKm.....	44
6. Grafik karakteristik kelompok tani Harapan Sentosa (a) Jenis kelamin, (b) Usia, (c) Pekerjaan utama.....	45
7. Grafik karakteristik kelompok tani Harapan Sentosa (a) pekerjaan sampingan, (b) Pendidikan akhir, (c) Luas lahan HKm.....	46
8. Tingkat Persepsi tentang perencanaan rehabilitasi hutan Gapoktan Margo Rukun	48
9. Tingkat Persepsi Perencanaan Rehabilitasi Hutan Gapoktan Harapan Sentosa	51
10. Tingkat Partisipasi perencanaan rehabilitasi hutan Gapoktan Margo Rukun	53
11. Tingkat Partisipasi di Harapan Sentosa	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Tertentu di Blok Pengelolaan KPHL Batutegi	17
2. Kategori skor dalam tingkat persepsi perencanaan rehabilitasi hutan ...	41
3. Kategori Skor dalam tingkat partisipasi perencanaan rehabilitasi hutan	41
4. Jumlah skor tingkat persepsi tentang perencanaan rehabilitasi hutan Gapoktan Margo Rukun	47
5. Jumlah skor tingkat persepsi tentang perencanaan rehabilitasi hutan Gapoktan Harapan Sentosa	49
6. Jumlah skor tingkat partisipasi perencanaan rehabilitasi hutan Margo Rukun.....	52
7. Jumlah skor tingkat partisipasi perencanaan rehabilitasi hutan Gapoktan Harapan Sentosa	54
8. Uji f pada karakteristik responden harapan sentosa dengan tingkat persepsi perencanaan rehabilitasi hutan	59
9. Uji t karakteristik responden harapan sentosa pada tingkat partisipasi perencanaan rehabilitasi hutan	60
10. Uji f karakteristik responden harapan sentosa pada tingkat partisipasi perencanaan rehabilitasi hutan	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lembar Kuisisioner.....	75
2. Dokumentasi Penelitian	79

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Ditengah menciutnya ruang kelola masyarakat akibat pembangunan kehutanan dan perkebunan berbasis korporasi, perhutanan sosial merupakan mekanisme pengelolaan kehutanan yang memberikan ruang kelola (akses) kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yaitu dengan menetapkan program Perhutanan Sosial dengan dasar hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kebijakan mengenai Perhutanan Sosial atau Hutan Kemasyarakatan dipandang sebagai alternatif pemecahan masalah pengelolaan hutan (Gilmour, 2016), dan konflik hutan (Purnomo dan Anand, 2014). Kegiatan Perhutanan sosial melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018; Suhardjito dan Wulandari, 2019).

Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi (Rahmina, 2012). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial berlaku pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Namun hilangnya fungsi hutan oleh kegiatan manusia masih kerap terjadi di wilayah Indonesia termasuk provinsi Lampung (Kristin *et al.*, 2018).

Pelaksanaan rehabilitasi menjadi salah satu upaya untuk melestarikan kembali wilayah hutan yang mengalami kerusakan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menjelaskan bahwa Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Guna mendukung keberlangsungan program rehabilitasi, perlu dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu. Kegiatan ini penting karena erat kaitannya dengan kesuksesan pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih jika program rehabilitasi dilakukan anggota HKm (Palumpun *et al.*, 2020). Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Sanjaya *et al.* (2017), didapat bahwa anggota kelompok tani Gapoktan Rukun Lestari Sejahtera Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, telah mengetahui pentingnya perencanaan, mulai dari perhitungan modal, jarak tanam, hingga pemanenan, sehingga pengelolaan HKm dapat berjalan dengan baik juga. Menurut Lufti *et al.* (2014), eksistensi dan peran serta masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok erat kaitannya dengan program RHL secara keseluruhan, termasuk perencanaan.

Keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain; faktor teknis, kelembagaan maupun sosial ekonomi masyarakat. Kendala yang seringkali dihadapi dari aspek teknis diantaranya kondisi tanah, iklim dan aspek ekologis lain, dalam aspek kelembagaan dikarenakan mengikuti prosedur keproyekan sering kali dihadapkan pada hambatan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pada aspek sosial ekonomi keberhasilan program dipengaruhi oleh persepsi dan perilaku sebagai faktor yang mendorong tingkat partisipasi masyarakat (Mamuko *et al.*, 2016). Persepsi merupakan pandangan yang berbeda dari setiap orang yang akan menimbulkan penindaklanjutan dengan respon serta tindak berbeda (Noor, 2020), sedangkan partisipasi merupakan keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi social maupun situasi tertentu (Akhmaddhian dan Fathanudien, 2015). Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan merupakan faktor yang

mendukung dan menjamin keberhasilan program RHL, persepsi berkaitan dengan pemahamannya terhadap program sedangkan partisipasi sebagai wujud tindakan sukarela terlibat secara aktif dalam program RHL (Mamuko *et al.*, 2016).

Walangitan (2012) menyatakan bahwa persepsi yang tinggi terhadap pentingnya konservasi tanah dan air berkorelasi positif dengan wujud keragaan usahatani konservasi yang diterapkan. Kurniawan *et al.* (2020), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang berkontribusi cukup penting dalam keberhasilan pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat.

Penelitian oleh Syamsuddin tahun 2021 didapat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan hutan desa Kalaodi di kategorikan dalam tingkat partisipasi yang tinggi setelah diadakan perencanaan program dalam memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan kelestarian budaya melalui kegiatan musyawarah. Hasil yang sama didapatkan oleh Kaharuddin *et al.* (2020), yaitu tingginya tingkat partisipasi masyarakat tersebut yang tidak lepas dari peran pendamping, pemerintah dan aturan lembaga HKM dalam fasilitasi dan penyediaan ruang partisipasi bagi masyarakat lokal.

Salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat lokal yaitu melalui adanya Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina oleh KPH Bersama mitra lainnya. Kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa merupakan kelompok tani yang dibina langsung oleh PT. Nestle dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adanya mitra pembinaan kepada KTH sangat mendukung program – program perhutanan sosial termasuk HKM terutama sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah karena kewenangan pengelolaan hutan ditarik ke tingkat provinsi (Wulandari *et al.*, 2019). Menurut Amirudin (2014), proses melibatkan masyarakat sekitar dalam perencanaan, pembangunan dan jalannya kegiatan perusahaan merupakan proses yang krusial. Pelibatan dengan cara-cara yang baik dapat memunculkan pengertian masyarakat sekitar tentang maksud dan tujuan perusahaan yang kemudian dapat menumbuhkan *trust* (rasa percaya) dan *sense of belonging* (rasa memiliki) karena adanya pandangan bahwa kehadiran perusahaan di daerahnya akan bermanfaat, sehingga masyarakat sekitar pun siap untuk memberikan

kontribusi bagi lancarnya kegiatan perusahaan. Sehingga dengan adanya CSR perusahaan juga berperan sebagai lembaga sosial yang memikul tanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Penelitian mengenai tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa dalam perencanaan program serta tingkat korelasinya dianggap penting untuk dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat korelasi tersebut mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan program rehabilitasi yang dijalankan oleh kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa dapat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.

1.2. Tujuan

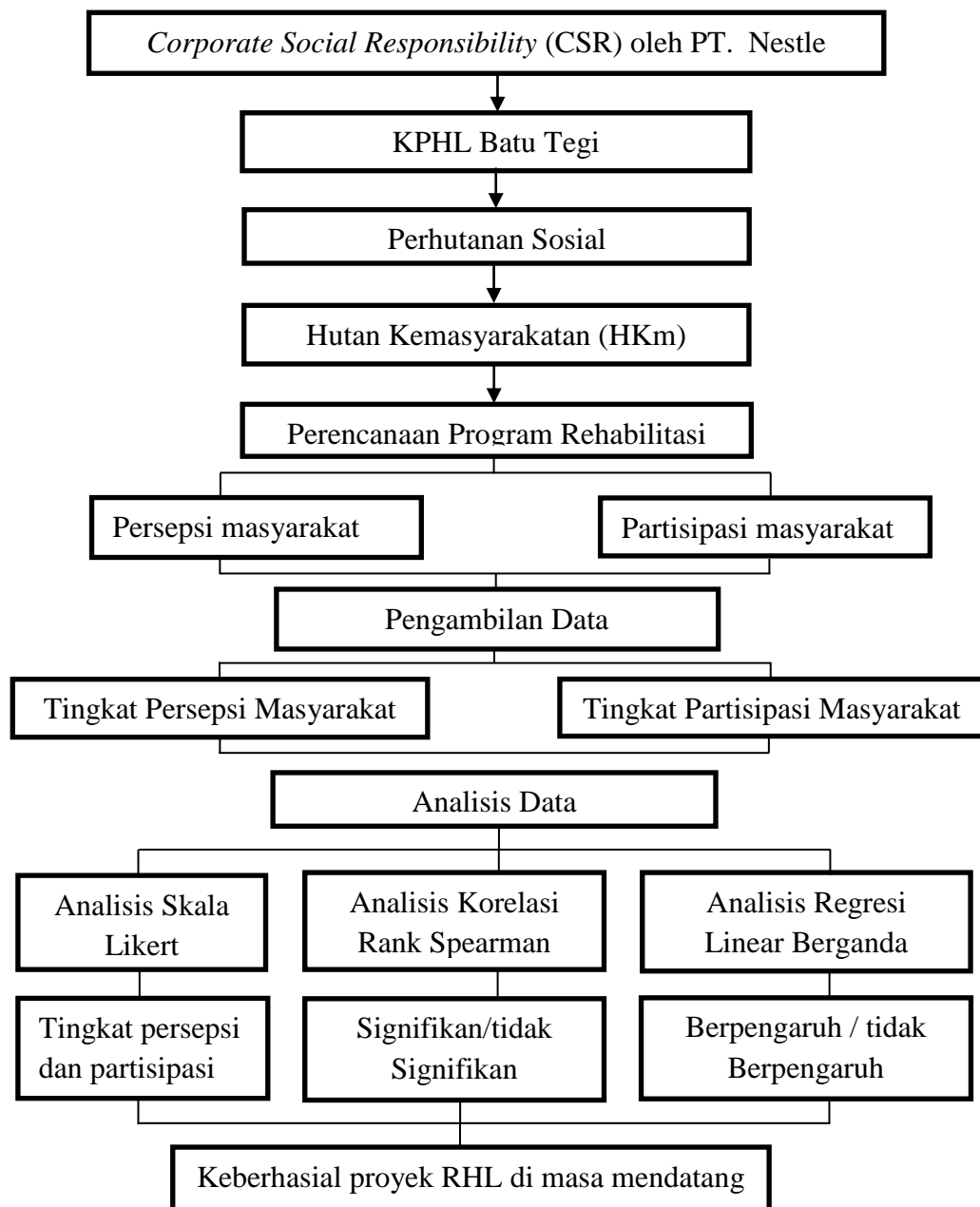
Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu.

1. Mengidentifikasi tingkat persepsi petani kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa terhadap perencanaan program rehabilitasi.
2. Mengidentifikasi tingkat partisipasi petani kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa terhadap perencanaan program rehabilitasi.
3. Menganalisis tingkat korelasi antara persepsi dengan partisipasi kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa terhadap perencanaan program rehabilitasi.

1.3. Kerangka Pemikiran

Dalam mendukung kebijakan prioritas pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dilakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang salah satunya melalui pengembangan HKm. Untuk memperbaiki lahan yang rusak akibat pengelolaan hutan maka perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi. Kegiatan pengelolaan hutan tersebut disertai dengan hak dan kewajiban pakai hutan. Penelitian ini akan mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dalam mendukung program rehabilitasi. Keterlibatan atau partisipasi petani dalam pengelolaan hutan pada dasarnya adalah suatu keharusan yang mutlak dilaksanakan demi terciptanya kemampuan awal petani untuk berkembang secara mandiri (Mulyawan, 2016; Reski *et al.*, 2017). Selanjutnya akan dilakukan analisis

terhadap tingkat korelasi antara persepsi dan partisipasi petani pada kegiatan RHL dengan menggunakan Analisis Korelasi *Rank Spearman*. Setelah diketahui tingkat korelasi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan RHL, maka hasil dapat digunakan sebagai acuan peluang keberhasilan proyek rehabilitasi di masa mendatang.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kondisi Umum KPHL Batutegi

2.1.1 Kondisi Geografis

Menurut RPHJP KPHL Batutegi tahun 2014 – 2023, secara geografis KPHL Batutegi terletak pada 104°27' - 104°54' BT dan 5°5' - 5°22' LS. KPHL Batutegi meliputi sebagian kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, sebagian kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya dan sebagian kawasan Hutan Lindung Register 32 Bukit Rindingan KPHL Batutegi terletak pada DAS Sekampung. DAS Sekampung Hulu memiliki 3 sungai utama, yaitu:

- 1) Way Sekampung yang mengalir dari pegunungan di sebelah barat
- 2) Way Sangharus yang mengalir dari Gunung Rindingan
- 3) Way Rilau yang mengalir dari pegunungan sebelah utara.

Kawasan KPHL Batutegi sebagian besar merupakan *cacthment area* bendungan Batutegi yang menjadi salah satu area penting di Provinsi Lampung. Areal ini terdiri dari kawasan hutan seluas +35.711 Ha (82,28 %) dan areal penggunaan lainnya seluas + 7.693 Ha (17,72 %).

Batas-batas KPHL Batutegi adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Non Hutan (APL) dan KPHL Unit VII Way Waya
- 2) Sebelah selatan : Non Hutan (APL)
- 3) Sebelah barat : Non Hutan (APL) dan KPHL Unit X Kota Agung Utara
- 4) Sebelah timur : Non Hutan (APL) dan KPHL Unit VII Way Waya

Secara visual, batas wilayah tersebut baru bisa dilihat pada peta karena di lapangan belum dibuat batas definitif yang disepakati oleh para pihak terkait. Padahal batas wilayah kelola merupakan hal penting yang harus ditetapkan di lapangan untuk memberi kepastian kawasan.

2.1.2 Kondisi Biofisik

Menurut RPHJP KPHL Batutege tahun 2014 – 2023, kawasan KPHL Batutege termasuk ke dalam daerah tangkapan air hulu Way Sekampung. Daerah tangkapan tersebut terdapat pada ketinggian antara 200 – 1.750 meter dari permukaan laut (mdpl). Daerah tersebut terbagi dalam beberapa satuan morfologi diantaranya satuan morfologi kerucut gunung api satuan morfologi pegunungan dan satuan morfologi perbukitan. Bagian barat dan barat laut terdapat satuan morfologi pegunungan dengan elevasi 400 – 1.250 mdpl. Bagian barat daya KPHL Batutege terdapat satuan morfologi kerucut gunung api dengan variasi elevasi 500 – 1.750 mdpl (G. Rindingan). Bagian timur, timur laut, tenggara, selatan dan utara KPHL Batutege terdapat satuan morfologi perbukitan yang bergelombang dan memiliki variasi elevasi 200 – 800.

RPHJP KPHL Batutege tahun 2014 – 2023 menyebutkan, areal KPHL Batutege dapat diakses melalui jalan setapak dan jalan tanah. Jalan tersebut hanya dapat dilewati dengan menggunakan kendaraan roda dua. Beberapa lokasi bahkan tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda dua tanpa menggunakan alat bantu. Kawasan lindung pada bagian hulu Way Sekampung (1.068 mdpl) dan jalan menuju Puncak Bukit Rindingan dengan tinggi 1600mdpl termasuk lokasi yang memiliki aksesibilitas cukup berat, hal tersebut dikarenakan lokasi tersebut terdapat pada wilayah yang terjal.

Aksesibilitas wilayah Kelola KPHL Batutege hanya 5% dari seluruh wilayah kelola yang aksesibilitasnya terbuka. Dominasi tutupan vegetasi wilayah KPHL Batutege berupa pertanian campuran dengan presentase 53,73%. Hampir semua wilayah tutupan tersebut dapat diakses dengan mudah dengan adanya jalan setapak yang dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan roda 2. Analisis peta lahan oleh PBKH Wilayah II Palembang mendapatkan luas wilayah kerja KPHL Batutege. Terdapat seluas 14.405,10 Ha atau sebesar 24,77% lahan kritis dan 45,56Ha atau sebesar 0,77% lahan sangat kritis. Mengingat KPHL Batutege merupakan KPHL dengan status Kawasan hutan lindung, presentase tersebut mengindikasikan bahwa kondisi KPHL Batutege cukup memprihatinkan sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan solusi dengan melakukan penggarapan lahan. Dalam RPHJP KPHL Batutege tahun 2014 – 2023, kondisi kondusif antara

KPHL dan masyarakat penggarap dapat mendukung pengurangan lahan kritis tersebut dengan bertahap.

2.1.3 Tutupan Lahan

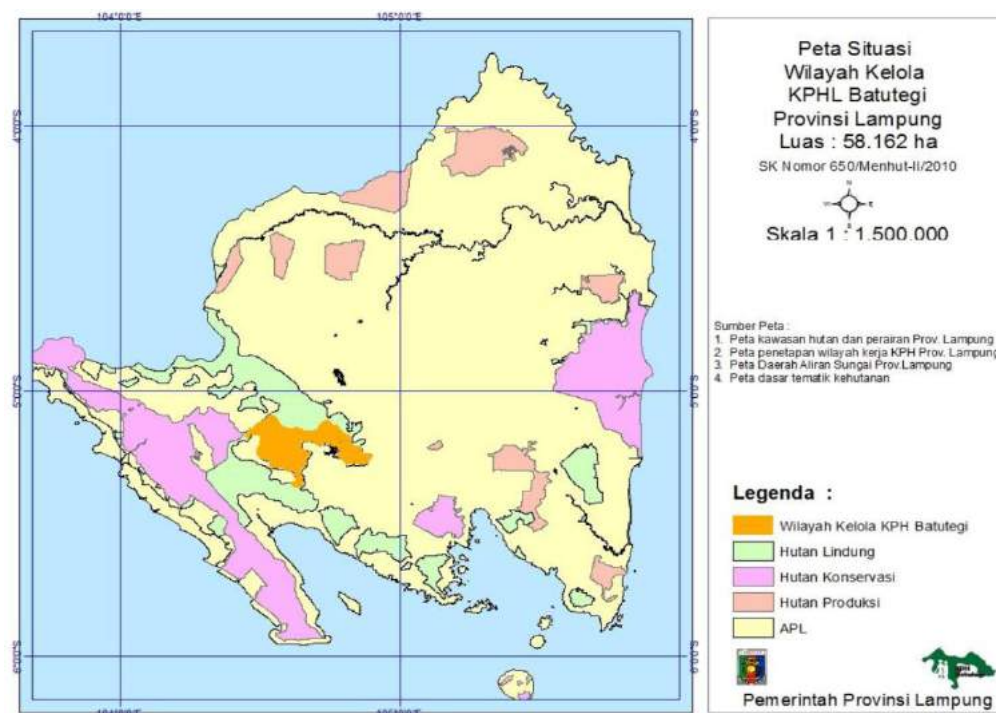
Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat oleh Dirjen Planologi Kehutanan pada tahun 2011 diketahui bahwa penutupan lahan wilayah kelola KPHL Batutegi didominasi dengan tutupan lahan non hutan dengan presentase sebesar 76,49%. Sesuai dengan yang tercantum dalam RPHJP KPHL Batutegi, 2014 – 2023, dalam wilayah Kelola KPHL Batutegi terdapat petani penggarap, baik yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani dan memiliki ijin usaha HKm maupun yang belum. Ketergantungan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan sangat tinggi karena sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan mereka di Kawasan hutan. Masyarakat khususnya petani juga memiliki persepsi dan partisipasi yang cukup tinggi dalam perencanaan rehabilitasi hutan, seiring dengan tingkat ketergantungan mereka terhadap hutan itu sendiri. Dalam RPHJP KPHL Batutegi tahun 2014 – 2023, kawasan hutan KPHL Batutegi jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat sebagian besar yaitu kopi dan cokelat.

2.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di dalam wilayah KPHL Batutegi di sebelah barat secara umum didominasi oleh jenis tanah alluvial adapun di sebelah timur didominasi oleh jenis tanah latosol dan di beberapa bagian kecil di daerah ketinggian didominasi oleh jenis tanah regosol, sedangkan tipe geologinya adalah sebagai berikut : di sebelah timur didominasi oleh volcanic, di bagian tengah oleh granitoid dan disebelah barat oleh clastic sediment. Berdasarkan hasil analisa oleh BPKH Wilayah II Palembang tahun 2012 untuk peta lahan kritis KPHL Batutegi, di dalam wilayah kerja KPHL Batutegi terdapat lahan kritis seluas 14.405,10 hektar (24,77 %), dan sangat kritis 45,56 hektar (0,77%). Kondisi tanah pada lahan yang dikelola anggota kelompok tani Margo Rukun memiliki pH 5,5 sedangkan pada lahan yang dikelola kelompok tani Harapan Sentosa memiliki pH 5-6 dimana pH tersebut masuk ke dalam kategori tanah bersifat asam.

2.1.5 Topografi

Berdasarkan peta topografi, DAS Sekampung Hulu dapat dibagi menjadi kelas lereng landai (3-8%), bergelombang (8-15%), berbukit (15-30%), agak curam (30-45%), dan curam (>45%) (Banuwa, 2008). Hal itu menunjukkan bahwa wilayah KPHL Batutege ini didominasi oleh daerah bergelombang hingga berbukit. Untuk bisa sampai ke KPHL Batutege, akses yang dapat dilalui berupa jalan tanah dan juga jalan setapak, oleh karena itu, akses tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan beroda dua. Pada beberapa lokasi seperti puncak Bukit Rindingan dengan tinggi 1.600 mdpl dan Kawasan lindung bagian hulu Way Sekampung dengan tinggi 1.068 mdpl akses kendaraan roda dua harus menggunakan alat bantu karena aksesibilitas yang berat dan lokasi yang terjal. Dalam RPHJP KPHL Batutege 2014 – 2023 dinyatakan bahwa dikarenakan dominasi tutupan lahan berupa lahan pertanian campuran, maka terdapat banyak jalan setapak yang dapat diakses oleh kendaraan roda dua.



Gambar 2. Peta Wilayah Kelola KPHL Batu Tegi (Sumber : RPHJP Batutege).

2.1.6 Pemanfaatan Kawasan Hutan

Wilayah kelola KPHL Batutege didominasi pemanfaatan oleh masyarakat untuk berkebun. Sampai saat ini terdapat izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) sebanyak 10 unit gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari total 24 Gapoktan yang ada. 14 Gapoktan sisanya terdiri dari 8 Gapoktan yang telah diverifikasi Kementerian Kehutanan dan 6 Gapoktan sedang dalam tahap fasilitasi pengajuan permohonan IUPHKm. Adapun penyebaran Gapoktan dalam masing – masing resort adalah sebagai berikut:

1. Resort Ulu Semong

- a. Berada di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.
- b. Terdapat 2 Gapoktan HKm yaitu Gapoktan HKm Tribuana dan Wanajaya.

1) Gapoktan HKm Tribuana:

- a) Jumlah anggota \pm 440 orang.
- b) Luas areal penetapan oleh Menhut 2547,22 Ha, yang sudah terbit IUPHKm \pm 678,37 Ha (yang sudah dilakukan pengukuran per bidang).
- c) SK Menhut No. 433/Menhut-II/2007 tanggal 11 Desember 2007 dan SK Bupati No. B.337/23/03/2007 tanggal 12-12-2007.

2) Gapoktan HKm Wana Jaya :

- a) Luas areal 1.781,20 Ha.
- b) Jumlah anggota 801 orang.
- c) Terdiri dari 13 kelompok.
- d) Proses pengajuan IUPHK baru sampai tahap usul penetapan areal ke Menteri Kehutanan.
- e) Kondisi tutupan lahannya berupa lahan pertanian campuran, tanah terbuka, semak belukar dan sedikit terdapat hutan sekunder.

- c. Semua areal di resort ini termasuk ke dalam blok pemanfaatan.

2. Resort Datar Setuju

- a. Berada di Kabupaten Tanggamus dalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara.
- b. Kondisi tutupan lahannya umumnya berupa lahan pertanian campuran dan semak belukar.

- c. Di dalam resort ini yang ada adalah blok pemanfaatan.
 - d. Wilayah resortnya terbagi habis menjadi 3 areal kelola Gapoktan HKm yaitu Gapoktan Bina Wana Jaya 1, Bina Wana Jaya 2 dan Gapoktan Sinar Harapan.
 - 1) Gapoktan Bina Wana Jaya 1 :
 - a) Jumlah anggota \pm 414 orang
 - b) Luas areal yang sudah terbit IUPHKM \pm 1592,40 Ha.
 - c) SK Menhut No. 751/Menhut-II/2009 tanggal 2-11-2009 dan SK Bupati No. B.266/39/12/2009 tanggal 11-12-2009.
 - 2) Gapoktan Bina Wana Jaya II :
 - a) Jumlah anggota \pm 281 orang
 - b) Luas areal yang sudah terbit IUPHKM \pm 1.044,80 Ha.
 - c) SK Menhut No. 751/Menhut-II/2009 tanggal 2-11-2009 dan SK Bupati No. B.265/39/12/2009 tanggal 11-12-2009.
 - 3) Gapoktan Sinar Harapan :
 - a) Usulan IUPHKm telah diverifikasi tahun 2009 dan tetapi belum mendapatkan penetapan Areal Kerja HKm.
 - b) Jumlah anggota \pm 471 orang, dengan luas areal yang diusulkan \pm 5.031,44 Ha.
3. Resort Way Sekampung
- a. Berada di Kabupaten Tanggamus dalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara.
 - b. Kondisi tutupan lahannya umumnya berupa hutan sekunder, semak belukar dan lahan pertanian campuran.
 - c. Di dalam resort ini seharusnya sebagian besar berupa blok inti, karena merupakan *catchment area* Way Sekampung, namun ternyata pengelolaan oleh masyarakat sudah merambah ke blok inti.
 - d. Terdapat 2 Gapoktan HKm yaitu Gapoktan Mandiri Lestari dan Gapoktan Wana Tani Lestari.
 - 1) Gapoktan Mandiri Lestari :
 - a) Jumlah anggota \pm 235 orang
 - b) Luas areal yang sudah terbit IUPHKM \pm 1.401,80 Ha.

- c) SK Menhut No. 751/Menhut-II/2009 tanggal 2 November 2009 dan SK Bupati No. B.262/39/12/2009 tanggal 11 Desember 2009.

2) Gapoktan Wana Tani Lestari :

- a) Proses pengusulan HKm saat ini masih dalam tahap penyusunan proposal dan pembuatan peta usulan dengan difasilitasi oleh KPHL Batutegi.
- b) Jumlah anggota \pm 423 orang.
- c) Luas areal kerja HKm yang diusulkan \pm 3.200 Ha.

4. Resort Banjaran

- a. Berada di Kabupaten Tanggamus dalam kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara dan Register 32 Bukit Rindingan.
- b. Kondisi tutupan lahan umumnya berupa semak belukar, lahan pertanian campuran dan sedikit terdapat hutan sekunder.
- c. Sebagian dari resort ini menjadi blok inti di Bukit Rindingan, karena menjadi catchment area Way Sangharus.
- d. Terdapat 7 Gapoktan HKm yaitu Gapoktan Margo Rukun, Harapan Sentosa, Karya Tani Mandiri, Hijau Makmur, Karya Bakti, Sidodadi dan Gapoktan Trisno Wana Jaya.

1) Gapoktan Margo Rukun :

- a) Sudah mendapat SK Penetapan areal dari Menteri Kehutanan No. 751/Menhut-II/2009 tgl 2 November 2009 dan IUPHKm Bupati Tanggamus dengan SK Bupati No. B.264/39/12/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- b) Terdiri dari 7 kelompok, jumlah anggota 400 orang dan luas areal IUPHKm 1.428,70 Ha.

2) Gapoktan Harapan Sentosa :

- a) Sudah mendapat SK Penetapan areal dari Menteri Kehutanan No. : 433/Menhut-II/2007 tgl 11 Desember 2007 dan IUPHKm dari Bupati Tanggamus dengan SK Bupati No. : B.335/23/03/2007 tanggal 12 Desember 2007.
- b) Terdiri dari 9 kelompok, jumlah anggota 273 orang dan luas areal IUPHKm 300 Ha.

- 3) Gapoktan Karya Tani Mandiri :
 - a) Sudah mendapat SK Penetapan areal dari Menteri Kehutanan No. : 751/Menhut-II/2009 tgl 2 November 2009 dan IUPHKm dari Bupati Tanggamus dengan SK Bupati No. : B.261/39/12/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - b) Jumlah anggota 656 orang dan luas areal IUPHKm 1.977,60 Ha.
 - c) Berada di areal KHL Register 32 Bukit Rindingan dan Register 39 Kota Agung Utara.
- 4) Gapoktan Hijau Makmur :
 - a) Sudah mendapat SK Penetapan areal dari Menteri Kehutanan No. : 751/Menhut-II/2009 tgl 2 November 2009 dan IUPHKM dari Bupati Tanggamus dengan SK Bupati No. : B.260/39/12/2009 tgl 11-12-2009.
 - b) Jumlah anggota 656 orang dan luas areal IUPHKm 1.190,00 Ha.
 - c) Berada di Areal KHL Register 32 Bukit Rindingan.
- 5) Gapoktan Karya Bakti :
 - a) Sudah mendapat SK Penetapan areal dari Menteri Kehutanan No.: 751/Menhut-II/2009 tgl 2 November 2009 dan IUPHKm dari Bupati Tanggamus dengan SK Bupati No. : B.258/39/12/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - b) Jumlah anggota 669 orang dan luas areal IUPHKm 1.896,40 Ha.
 - c) Berada di Areal KHL Register 39 Kota Agung Utara.
- 6) Gapoktan Sidodadi :
 - a) Usulan IUPHKm melalui Kab. Tanggamus dan telah diverifikasi tahun 2009, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan penetapan Areal Kerja HKm.
 - b) Jumlah anggota 392 orang dan luas areal IUPHKm 2.214,08 Ha.
 - c) Berada di Areal KHL Register 39 Kota Agung Utara.
- 7) Gapoktan Trisno Wana Jaya :
 - a) Proses pengusulan HKm saat ini masih dalam tahap penyusunan Proposal dan pembuatan peta usulan AKHKm dengan difasilitasi oleh KPHL Batutegi.
 - b) jumlah anggota ± 400 orang

c) luas areal kerja HKm yang diusulkan \pm 1096,139 Ha.

5. Resort Batulima

- a. Berada di Kabupaten Tanggamus dalam kawasan hutan lindung Register 32 Bukit Rindingan.
- b. Kondisi tutupan lahannya mayoritas berupa lahan pertanian campuran, semak belukar dan sedikit berhutan sekunder.
- c. Sebagian dari resort ini termasuk blok inti, karena menjadi hulu Way Sangharus di Bukit Rindingan.
- d. Di wilayah Resort Batulima terdapat 2 Gapoktan HKm yaitu Gapoktan HKm KPPM dan Gapoktan Mahardika.

1) Gapoktan KPPM :

- a) Sudah mendapat SK Penetapan areal dari Menteri Kehutanan No. : 433/Menhut-II/2009 tgl 11 Desember 2007 dan IUPHKm Bupati Tanggamus dengan SK Bupati No. : B.333/23/03/2007 tanggal 12 Desember 2007.
- b) Terdiri dari 11 kelompok, jumlah anggota 304 orang dan luas areal IUPHKm 593,58 Ha.
- c) Areal kerja HKm KPPM sebagian berada di Register 32 Bukit Rindingan dan sebagian di Register 30 Gunung Tanggamus (wilayah kelola KPHL Kota Agung Utara).

2) Gapoktan Mahardika :

- a) Luas areal kerja HKm yang diusulkan seluas 2.366,50 Ha.
- b) Berada di Register 32 Bukit Rindingan.

6. Resort Way Waya

- a. Berada di Kabupaten Pringsewu dalam kawasan hutan lindung Register 22 Way Waya.
- b. Kondisi tutupannya mayoritas berupa lahan pertanian campuran dan semak belukar.
- c. Sebagian areal di resort ini merupakan blok inti, karena menjadi catchment area Way Rilau.

d. Di wilayah Resort Way Waya terdapat 3 Gapoktan HKm yaitu Gapoktan HKm Wana Lestari, Sumber Makmur dan Gapoktan Sumber Tani Makmur.

1) Gapoktan Wana Lestari :

- a) Proses pengusulan IUPHKm saat ini masih dalam tahap penyusunan proposal dan pembuatan peta usulan areal kerja HKm dengan difasilitasi oleh KPHL Batutegi
- b) Jumlah anggota \pm 1.500 orang
- c) Luas areal kerja HKm yang diusulkan seluas \pm 4.000 Ha.
- d) Berada di Register 22 Way Waya Kab. Pringsewu.

2) Gapoktan Sumber Makmur :

Jumlah anggota 670 orang, luas areal yang diusulkan 1.405,22.

3) Gapoktan Sumber Tani Makmur :

Jumlah anggota 1.281 orang dan luas areal yang diusulkan 2.230 Ha.

Gapoktan yang sudah mendapatkan IUPHKm seluas 11.103,65 hektar, sedangkan 14 lainnya belum memiliki IUPHKm dengan luas 36.230,81 hektar. Selain IUPHKm juga terdapat ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk pemanfaatan air bagi PDAM di wilayah Kecamatan Air Naningan dan sekitarnya, tetapi lokasi ijin berada di Resort Banjaran masuk dalam Gapoktan Hijau Makmur dengan luas sekitar 5 Ha. Luas wilayah blok pengelolaan KPHL Batutegi seluas 58.162 Ha dengan pembagian wilayah seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Luas pembagian wilayah di Blok Pengelolaan KPHL Batutegi

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Blok inti	10.827,00
2.	Blok pemanfaatan	47,334.46
	a. Areal Berizin	11.103.65
	b Wilayah Tertentu	36,230,81
	Jumlah	58.162,00

2.1.7 Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Sekitar Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi berhimpitan dengan sekitar 20 wilayah desa di tiga kecamatan di Kabupaten Tanggamus dan satu desa di Kabupaten Pringsewu, satu desa di Kabupaten Lampung Barat, dan dua desa di Kabupaten Lampung Tengah. Mata pencaharian penduduk sekitar KPHL Batutegi adalah di sektor pertanian dengan dengan produk unggulan kopi dan kakao. Sebagian kecil lainnya sebagai pegawai negeri dan sektor jasa.

Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan cukup tinggi karena sebagian besar menjadikan kawasan hutan sebagai tempat mencari nafkah, akan tetapi mereka memiliki persepsi yang cukup baik tentang kawasan hutan walaupun belum diimplementasikan dalam teknik budidaya yang sesuai. Dari kondisi tersebut, maka KPH sebagai institusi kehutanan baru di tingkat tapak meningkatkan pengetahuan mereka dengan mengikuti penyuluhan maupun pelatihan tentang pengelolaan Kawasan hutan khususnya dari sisi kelembagaan dan teknik.

Di sekitar wilayah kelola KPHL Batutegi tidak terdapat masyarakat adat. Desa-desa yang berbatasan merupakan desa baru yang dihuni oleh masyarakat dengan multikultur karena berasal dari berbagai suku. Walaupun tidak melalui inventarisasi yang mendalam tetapi secara umum dapat diketahui bahwa terdapat 4 suku dominan, yaitu Suku Jawa, Sunda, Semendo dan Lampung. Keempat suku tersebut telah berasimilasi dan bertoleransi satu sama lain dengan baik sehingga dapat hidup berdampingan tanpa konflik yang berarti.

2.2. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan upaya legal reforestasi dengan masyarakat sebagai pelaku utama yang dalam artian telah mengkulturisasikan pendekatan *community based forest management* (Murti, 2018). Penyelenggaraan perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Perhutanan sosial sebagai kebijakan pengelolaan hutan dan menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha pemanfaatan hutan dan kemitraan, serta pemetaan konflik di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Adapun target kinerja pemerintah dalam program perhutanan sosial yaitu meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat, meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan terurial di kawasan hutan dan meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan kehutanan (Dani dan Apriyanto, 2019).

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ps. 1 dan PermenLHK No. 9 tahun 2021). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat ditingkatkan sehingga manfaat hutan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat sekitar hutan (Kaskoyo *et al.*, 2017; Susilo dan Nairobi, 2019). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial, dalam kebijakan tersebut terdapat skema pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat di dalamnya yaitu skema Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Novayanti *et al.*, 2017). KPHL Batu tegi memiliki blok pemanfaatan Hutan Lindung yang difungsikan sebagai pemanfaatan terbatas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan pemanfaatan hutan untuk kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, seluas 47.334,46 hektar, areal tersebut terdiri dari areal berijin 11.103,65 hektar dan wilayah tertentu seluas 36.230,81 hektar. Wilayah Kelola KPHL Batutegi sebagian besar dimanfaatkan untuk berkebun oleh masyarakat, dimana dari 24 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada, terdapat izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) untuk 10 unit gapoktan, sedangkan untuk 14 Gapoktan lainnya,

terdapat 8 Gapoktan yang telah diverifikasi Kementerian Kehutanan dan 6 Gapoktan yang sedang dalam tahap fasilitasi pengajuan permohonan IUPHKm.

2.2.1 Hutan Desa (HD)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pengelolaan hutan desa pada prinsipnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar hutan, agar ikut memperoleh manfaat dari keberadaan hutan tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan tersebut (Nurhaedah dan Hapsari, 2014). Menurut Batari *et al.* (2017), pembangunan hutan desa dapat memberi kontribusi untuk pengembangan keamanan mata pencaharian bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan, melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan institusi publik dalam penguasaan sumberdaya alam.

2.2.2 Hutan Adat (HA)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak pada Pasal 1 dinyatakan Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya pada pasal 2 dinyatakan bahwa:

- (1) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan Hutan lestari.
- (2) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu. Pemerintah menetapkan status hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) dilakukan dengan kriteria:

- a. berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara
- b. terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh MHA dengan batas yang jelas secara turun temurun
- c. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2.2.3 Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi (Hakim, 2009). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat dinyatakan bahwa Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Menurut Miranda (2015), secara teknis dan manajemen, program HTR dapat merupakan upaya kelembagaan kehutanan dalam menata kembali konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang dimulai dari bawah dengan luasan sempit. Program HTR bersifat multi-sektor, multi-pihak dan multi-strata pemerintahan sehingga memiliki kerangka kelembagaan yang luas dan meliputi berbagai bidang untuk memperkuat *forestry governance* secara nasional.

2.2.4 Kemitraan Kehutanan

Pada skema HKm, HD, HTR, skema yang digunakan adalah skema izin yang dikeluarkan oleh Menteri LHK atau Gubernur yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Menteri LHK, sedangkan dalam skema Kemitraan maka menggunakan pola kerjasama antara masyarakat dengan pemegang izin atau pengelola hutan, wujud dari persetujuan kemitraan ini berupa kontrak perjanjian, yang di dalamnya termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak baik masyarakat maupun pemegang izin (Ma'ruf, 2019). Menurut PermenLHK Nomor

9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 1 (18) menyatakan bahwa persetujuan kemitraan kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi, selanjutnya dinyatakan pada bab 2 pasal 3 (2) bahwa kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dilaksanakan pada Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk Kemitraan Konservasi. Pasal 8 (2) menyatakan jangka waktu persetujuan kemitraan kehutanan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan masyarakat setempat disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dalam melakukan hubungan kemitraan masyarakat tentunya harus membuat kesepakatan dengan perusahaan pemegang ijin atau dengan pengelola hutan (Ma'ruf, 2019).

2.2.5 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

2.2.5.1. Gambaran Umum HKm

Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah hutan kemasyarakatan (HKm). Dengan adanya HKm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini, 2013). Petani HKm mengelola hutan negara dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. HKm dapat dilaksanakan baik di hutan produksi maupun di hutan lindung. HKm diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelola lahan hutan secara ilegal (perambahan), ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi (Dewi *et al.*, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Pasal

(1) Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Menurut Sanjaya *et al.* (2017), Hutan Kemasyarakatan termasuk dari tiga skema pengelolaan hutan kolaboratif oleh kehutanan bersama masyarakat. Hutan kemasyarakatan sebagai salah satu bentuk perhutanan sosial menjadi upaya dalam mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan (Puspasari *et al.*, 2017). Gapoktan Margo Rukun dan Harapan Sentosa merupakan gapoktan HKm yang terdapat pada KPHL Batutege tepatnya di Resort Banjaran. Resort tersebut berada di Kabupaten Tanggamus yang berada di dalam kawasan hutan lindung Register 32 Bukit Rindingan dan Register 39 Kota Agung Utara, dimana terdapat sedikit hutan sekunder, lahan pertanian campuran serta memiliki kondisi tutupan lahan umum berupa ssemak belukar.

2.2.5.2. Izin Usaha Pemanfaatan HKm

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut Hkm. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, tujuan HKm adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan milik Negara dengan sebaik-baiknya selama jangka waktu 35 tahun dengan ketentuan 70% tanaman yang tumbuh di lahan tersebut berupa pohon berkayu. Menurut Rahayu dan Triwanto (2021), dari penerapan pemanfaatan HKm, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi melalui peningkatan produksi kayu hingga hasil hutan non kayu serta manfaat ekologi melalui konservasi tanah dan air. Masyarakat yang ingin mengelola hutan dalam skema HKm harus memperoleh Izin Usaha Pengelolaan HKm (IUPHKm) yang dapat diberikan untuk:

- a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
- b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan
- c. wilayah tertentu dalam KPH.

Pemberian IUPHKm pada PermenLHK No. 9 Th. 2021 tentang Perhutanan sosial mengacu pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Izin Usaha Pemanfaatan HKm dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS. Pemberian IUPHKm di luar PIAPS berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan HKm antara lain:

- a. Areal kerja HKm adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.
- b. Penetapan areal kerja HKm adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh menteri untuk areal kerja HKm.
- c. Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.
- d. Izin usaha pemanfaatan HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
- e. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja pada hutan produksi.

Saat ini HKm diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelola lahan hutan secara ilegal (perambahan), ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi (Dewi *et al.*, 2018).

2.2.5.3 Prosedur Teknis Pengajuan Izin HKm

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, Izin Pemanfaatan HKm harus melalui tahapan atau prosedur yang berlaku. Prosedur teknis pengajuan izin HKm adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan izin usaha pemanfaatan HKm oleh kelompok masyarakat setempat kepada bupati walikota atau kepada gubernur, apabila areal yang dimohon lintas kabupaten atau kota.
- 2) Kelompok masyarakat setempat mengajukan surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen surat keterangan kelompok dari kepala desa yang memuat, nama kelompok, daftar nama anggota kelompok beserta keterangan domisili, mata pencarian, struktur organisasi dan sketsa areal kerja yang dimohon dengan memuat informasi:
 - a. Letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan desa
 - b. Mencantumkan titik koordinat yang bisa dijadikan indikasi letak areal
 - c. Batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon
 - d. Potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan.

2.3. Deforestasi

Deforestasi merupakan kegiatan perubahan tutupan hutan menjadi bukan hutan yang berdampak pada penurunan fungsi ekosistem hutan. Deforestasi di Indonesia telah menjadi masalah nasional karena berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional, kesejahteraan masyarakat dan ancaman keanekaragaman hayati yang terdapat dalam hutan. (Restrepo *et al.*, 2015)

Deforestasi terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor alami berupa perubahan iklim atau bencana alam atau adanya faktor aktivitas/gangguan manusia (antropogenik). Deforestasi yang terjadi akibat peristiwa alam dapat berupa kejadian cuaca ekstrim, kekeringan dan atau kebakaran hutan (Eckert *et al.*, 2012). Aktivitas manusia menjadi penyebab yang paling berkontribusi terhadap terjadinya deforestasi dan dapat berkaitan langsung dengan aktor atau pelakunya (Geist dan Lambin, 2012).

Deforestasi memiliki dampak yang sangat buruk bagi tanah. Hilangnya hutan mengakibatkan tidak dapatnya air meresap ke tanah. Air hujan yang turun mengalir di permukaan akan menyebabkan erosi. Efek samping dari terjadinya erosi adalah kehilangan kesuburan tanah akibat pencucian tanah oleh air hujan yang terus menerus, banjir akibat tanah yang tidak dapat meresap air, hingga tanah longsor (Arif, 2016).

2.4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

RHL merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai (DAS). Ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi lahan, RHL mengambil posisi dalam mengisi kesenjangan, selain itu RHL juga sangat berperan dalam meningkatkan luas areal bertegakan hutan dan bangunan konservasi tanah; memulihkan fungsi hidrologi hutan dan lahan dalam DAS; memulihkan fungsi perlindungan tanah dan stabilitas iklim mikro; meningkatkan produksi Oksigen (O₂) dan penyerap gas-gas pencemar udara; memulihkan dan melestarikan sumberdaya plasma nutfah; membuka peluang kesempatan berusaha dan kesejahteraan masyarakat; membuka peluang untuk pengembangan ekowisata; memulihkan citra negara, bangsa, pemerintah, dan masyarakat di mata dunia (Walhi, 2014).

Upaya rehabilitasi lahan kritis, lahan kosong atau lahan tidak produktif dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan lahan kritis melalui program RHL. Implementasi program tersebut akan membutuhkan bibit dalam jumlah yang besar, maka melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.P24/ Menhut-II/2010 pemerintah berupaya untuk memberdayakan masyarakat dalam menyediakan bibit berkualitas melalui Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Amir,2014). Sebagaimana tertera dalam PP No 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dimana terdapat peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL termasuk dalam kegiatan penyediaan bibit. RHL merupakan program yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama (*multiyears*), melibatkan berbagai pihak, serta menggunakan sumber daya yang tidak sedikit (Jatmiko *et al.*, 2012).

2.5. Gabungan Kelompok Tani Hutan

Secara Umum Menurut Nazaruddin dan Anwarudin (2018) persepsi berkorelasi dengan tingkat partisipasi dan motivasi pemuda yang tergabung dalam kelompok tani. Persepsi yang baik akan berkorelasi dengan partisipasi dan motivasi anggota kelompok tani dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pertanian No. 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani, gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut sebagai Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Hubungan yang baik antar anggota yang satu dengan anggota lainnya dalam kelompok tani dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi dan meningkatkan kesejahteraan petani baik secara ekonomi maupun sosial. Terjalinnnya hubungan yang lebih baik dalam wadah kelompok tani tersebut menyebabkan petani menjadi dapat menentukan nasibnya sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak (Samuel *et al.*, 2012). Hamilton *et al.*, (2015) yang mengemukakan bahwa kelompok tani sebagai wadah kerjasama dapat membuat petani menjadi bertambah kuat dalam upaya meningkatkan keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian. Kuatnya kelembagaan dalam suatu kelompok tani mendukung usaha pengelolaan hutan menjadi lebih menguntungkan dan mempunyai daya saing sehingga mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan menjadikan petani yang mandiri. Kondisi tersebut mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mandiri dan lestari.

Frese dan Gielnik (2014) menyatakan bahwa kelembagaan petani dan tindakan kolektif sering dilihat sebagai faktor kunci dalam meningkatkan akses petani ke pasar. Hubungan anggota dengan anggota lainnya dan kelompok tani lainnya dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi dan meningkatkan perannya secara sosial. Terjalinnnya hubungan yang lebih baik dalam wadah kelompok tani tersebut menyebabkan pemuda tani menjadi lebih kompak dan mudah memperoleh informasi. Kondisi ini selaras dengan Hamilton *et al.* (2015), yang mengemukakan bahwa kelompok tani sebagai wadah kerjasama dapat membuat petani menjadi bertambah kuat. Kondisi ini juga didukung Frese dan Gielnik (2014) bahwa kelembagaan petani dan tindakan kolektif sering dilihat sebagai faktor kunci dalam meningkatkan akses petani.

2.6. Persepsi

2.6.1 Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses masuknya informasi terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungannya secara terus menerus melalui panca indra manusia yaitu indra pengelihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa dan indra peraba. Persepsi merupakan proses individu mengenali objek dan kejadian yang sifatnya objektif dengan melalui panca indera. Menurut Dewinta *et al.* (2018), setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat suatu hal atau objek yang sama dengan caranya masing-masing. Tadesse dan Taketay (2017) menyatakan bahwa perbedaan tersebut dapat berkorelasi dengani oleh banyak faktor, diantaranya yaitu pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang darimana individu tersebut melihat.

Persepsi berkaitan erat dengan bagaimana cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menginterpretasikannya. Untuk mempermudah mengartikan persepsi, dapat dijabarkan pada beberapa pengertian berikut.

- a. Persepsi adalah proses psikologi yang dialami seseorang untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal didasari oleh stimulan tertentu (Tuty *et al.*, 2017). Persepsi juga dapat berarti pengalaman untuk mengartikan makna dari seorang atau objek yang dilihanya.
- b. Persepsi adalah selektif ketika mempersepsikan sesuatu, biasanya hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu dari objek atau tertentu berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada dalam diri yang bersangkutan dan mengabaikan karateristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut (Dewinta *et al.*, 2018).
- c. Persepsi adalah penyimpulan proses psikologi dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap oleh indra (Novayanti *et al.*, 2017).

- d. Persepsi merupakan isu sentral dalam epistemologi (cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan), teori pengetahuan. Pada akar, semua pengetahuan empiris kita didasarkan pada bagaimana kita melihat, mendengar, menyentuh, bau dan rasa dunia di sekitar kita (O'Brien, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah hasil interpretasi individu dalam menilai suatu objek melalui panca indra, dimana hasil interpretasi tiap individu terhadap objek yang sama akan menghasilkan persepsi yang berbeda sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang masing-masing. Tadesse dan Teketay (2017) menyatakan bahwa sebagian besar persepsi negatif dan sikap terhadap PFM mungkin terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sekitar PFM dan ketergantungan jangka panjang pada hutan sumber daya di daerah tersebut. Bahkan, sebagian besar responden memiliki persepsi positif dan sikap terhadap konsep dan implementasi dari PFM. Banyak responden yang setuju mereka mendapat manfaat karena penerapan PFM.

2.6.2 Sifat-sifat Persepsi

Sifat-sifat persepsi menurut Nugroho *et al.* (2018), terjadi secara spontan dalam benak individu berdasarkan dengan keyakinan yang kuat. Persepsi bukan ada di dalam objek dan selalu merupakan pengetahuan tentang penampakan. Persepsi menurut Nchor dan Asuk (2018) memiliki peranan penting dalam menginterpretasi kondisi lingkungan karena setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menginterpretasi suatu hal tergantung dengan bagaimana persepsi individu tersebut. Persepsi pada prosesnya terjadi secara otomatis, sehingga setiap individu yang berbeda dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama. Wulandari (2010) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang memberikan kesadaran bagi seseorang tentang suatu objek diluar dirinya melalui panca indra.

Menurut Alizamar dan Couto (2016) Sifat-sifat persepsi antara lain sebagai berikut:

1. Persepsi bersifat tidak akurat, setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu yang disebabkan oleh berkorelasi dengan masa lalu, selektivitas dan penyimpulan.
2. Persepsi bersifat evaluatif, persepsi tidak akan pernah objektif karena dalam proses menginterpretasikan makna berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi. Sehingga dalam mempersepsikan suatu objek perlu dilihat baik atau buruknya adalah sangat langka jika dapat mempersepsikan suatu secara sepenuhnya netral

2.6.3 Faktor Persepsi

Masria *et al.* (2015), menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap hutan yang tergolong baik tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, malah sebaliknya dapat bersifat negatif. Banyak faktor yang memengaruhi terutama kepentingan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara sesaat. Irawan *et al.* (2017), menyatakan bahwa sekalipun persepsi masyarakat baik terhadap hutan tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, malah sebaliknya negative dan diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hasil tersebut, salah satunya adalah terkait pemahaman terhadap batas hutan yang dimiliki masyarakat.

Heryatna *et al.* (2015), menyatakan faktor yang berhubungan dengan persepsi terhadap HKm, yaitu umur, pengetahuan dan kosmopolitan. Faktor yang tidak signifikan dapat dilihat pada faktor umur, dan faktor yang signifikan adalah faktor pengetahuan dan faktor kosmopolitan. Putra (2015) menyatakan beberapa faktor yang dapat berkorelasi dengan persepsi antara lain faktor demografi (umur, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pendapatan, usaha sampingan, tempat tinggal), faktor sosial budaya (suku), faktor properti (luas lahan garapan, jenis tanaman, kepemilikan hp, kepemilikan kendaraan), faktor aksesibilitas (jarak ke jalan akses dan jarak ke kampung).

Menurut Noor (2020), keberagaman persepsi meliputi faktor-faktor personal yang ada pada diri individu (internal) dan faktor-faktor dari lingkungan individu (eksternal). Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor internal

- 1) Pendidikan Formal
- 2) Motivasi
- 3) Kebutuhan
- 4) Umur
- 5) Pengalaman
- 6) Perhatian
- 7) Jumlah tanggungan

b. Faktor eksternal

- 1) Pengetahuan informasi
- 2) Lingkungan sosial
- 3) Dukungan instansi terkait

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berkorelasi pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga berkorelasi dengan oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

2.7. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*participation*” yang artinya suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi, namun sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah, 2017). Menurut Uceng *et al.* (2019), partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan

dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dua macam bentuk partisipasi menurut Tangkilisan (2015), yaitu.

1. Partisipasi Horizontal, merupakan partisipasi yang terjadi diantara warga maupun anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai keupayaan untuk bekerjasama secara proaktif untuk menyelesaikan aktivitas pembangunan.
2. Partisipasi Vertikal, merupakan keterlibatan antara seluruh masyarakat dengan pemerintah, dimana masyarakat berada pada posisi pengikut atau klien.

2.8. Pemberdayaan Masyarakat

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Uthami, 2016). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen pemberdayaan perlu ditunjang oleh kompetensi yang mampu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Anwas, 2013). Menurut Tunggal (2018), masyarakat merupakan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

2.9 Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi hanya digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel, tanpa perlu memperhatikan

variabel yang dipengaruhi atau variabel yang mempengaruhi (Sulistiyowati dan Astuti, 2017). Menurut Supranto (2018), persamaan untuk menghitung koefisien korelasi dinyatakan sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{\left(n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) \left(n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right)}}$$

dimana :

X = variabel prediktor

Y = variabel respon jumlah data

i = 1, 2, 3, ..., n

n = jumlah data

Koefisien korelasi bisa bernilai positif atau negatif dan nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Korelasi negatif ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai negatif begitu juga sebaliknya korelasi positif ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai positif (Sulistiyowati dan Astuti, 2017).

2.10 Analisis Regresi

Teknik analisis yang mencoba menjelaskan hubungan antara dua peubah atau lebih khususnya antara peubah-peubah yang mengandung sebab akibat disebut analisis regresi (Wibisono, 2015). Analisis regresi dapat didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional linear antara satu variabel respon dengan satu variabel prediktor. Terdapat dua jenis variabel dalam analisis regresi yaitu variabel respon atau disebut dengan variabel dependen (Y) dan variabel prediktor atau disebut variabel independen (X). Variabel respon (Y) dinyatakan juga sebagai variabel yang dipengaruhi dan variabel prediktor (X) dinyatakan juga sebagai variabel yang mempengaruhi.

Terdapat dua jenis analisis regresi linier yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier sederhana hanya melibatkan satu variabel prediktor sedangkan analisis regresi linier berganda melibatkan dua atau lebih variabel prediktor (Sulistiyowati dan Astuti, 2017).

2.10.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Analisis regresi telah lama dikembangkan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih peubah (variabel). Berbeda dengan analisis analisis regresi linier sederhana terdapat juga analisis regresi linier yang melibatkan lebih dari satu variabel predoktor (X) yang disebut sebagai analisis regresi linier berganda. Secara umum analisis regresi linier berganda dapat didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional linear antara satu variabel respon (Y) dengan dua atau lebih variabel prediktor (X) (Sulistiyowati dan Astuti, 2017). Menurut Ghozali (2018), jika terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka disebut regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresi linier berganda yang melibatkan dua variabel prediktor, tiga variabel prediktor dan k buah variabel prediktor dinyatakan sebagaimana persamaan sebagai berikut:

$$\hat{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

$$\hat{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

$$\hat{y} = a + b_1x_1 + \dots + b_kx_k$$

dimana :

\hat{y} = variabel terikat

x = variabel bebas

a = konstanta

2.10.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu.

Pengujian hipotesis terdapat asumsi/ pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H_0 dan penolakan H_0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya/ hipotesis alternatif yang dinyatakan oleh H_1 . Jika telah ditentukan Koefisien Determinasi (r^2), maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan Uji-T ; Uji-F ; Uji-Z atau Uji Chi Kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas/ *predictor/ independent* (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas/ *response/ dependent*

(Y). Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variable berlaku bagi seluruh populasi.

2.10.3 Uji – F

Menurut Yuliara (2016), penggunaan Uji-F bertujuan mengetahui apakah variabel-variabel bebas (X1 dan X2) secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variable tak bebas Y. Tahapan yang dilakukan dalam Uji - F adalah:

1. Menentukan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$; (variable X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y)

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$; (variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y)

2. Menentukan Taraf/tingkat Signifikansi:

(α) Nilai yang sering digunakan untuk adalah $\alpha = 5\%$

3. Menentukan F hitung:

Rumus F hitung : $F_{hitung} = \frac{r^2/k}{(1-r^2)(n-k-1)} = \frac{r^2(n-k-1)}{k(1-r^2)}$

4. Menentukan F table (mempergunakan table Uji-F) Tabel Uji-F untuk $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan pembilang (Numerator, df) = k - 1; dan untuk penyebut (Denominator, df) = n - k. n= jumlah sample/ pengukuran, k= jumlah variable bebas dan terikat).

5. Kriteria Pengujian nilai Fhit dan Ttab

Apabila nilai Fhit < Ftab, maka hipotesis H_1 ditolak dan H_0 diterima. Apabila nilai Fhit > Ftab, maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak.

2.11 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

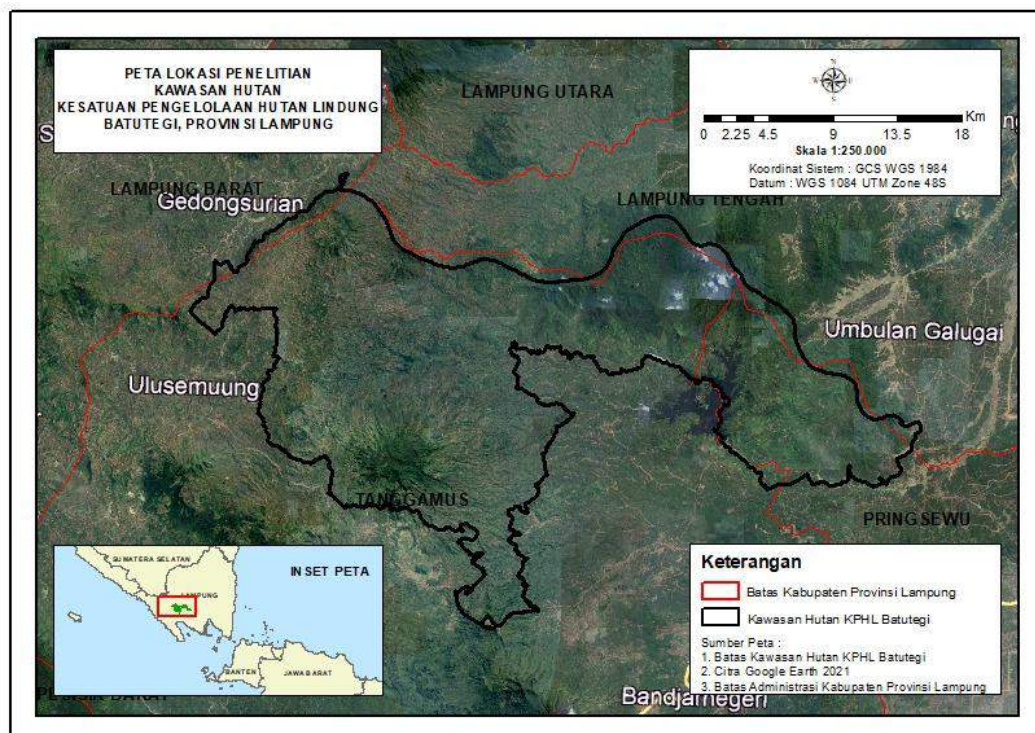
Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka hutan lindung dan hutan produksi menjadi kewenangan daerah. Dengan pembagian kewenangan itu maka untuk mewujudkan harapan pencapaian Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Pemerintah mendorong pembangunan KPHP dan KPHL di daerah. Aturan tentang pembangunan KPH telah tersedia cukup lengkap bahkan sampai kompetensi bagi personil yang ditempatkan pada organisasi ini, akan tetapi secara operasional

belum seluruh aturan dari Pemerintah. Kementerian Kehutanan menempatkan KPH sebagai unit manajemen pengelolaan hutan. Untuk melaksanakan pengelolaan tingkat tapak maka diperlukan wilayah kerja yang memiliki kepastian hukum yang jelas. Kondisi hutan di Provinsi Lampung secara umum telah ditata batas akan tetapi seiring dengan penetapan wilayah KPH, maka diperlukan penataan batas wilayah kerja KPH sehingga KPH sebagai pengelola dapat menjalankan tugasnya tanpa ada kekhawatiran akan melampaui batas wilayah kewenangannya (RPHJP KPHL Batutegei, 2014 – 2023).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di KPHL Batu Tegi, pekon Datarajan, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus tepatnya. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut belum pernah dilakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan melalui perhutanan sosial. Penelitian dilakukan pada bulan November tahun 2021.



Gambar 3. Peta lokasi KPHL Batutegi.

3.2. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang di gunakan yaitu alat tulis, kuisisioner, kamera, laptop, *software SPSS 26* dan *Microsoft excel*. Objek penelitian ini ialah anggota dari kelompok tani Margo Rukun, dan kelompok tani Harapan Sentosa.

3.3. Rancangan Penelitian

3.3.1. Teknik Penentuan Responden

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dimana menurut (Sugiyono,2013) tujuan menggunakan *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti. Responden merupakan anggota dari kelompok tani gapoktan Margo Rukun dan gapoktan Harapan Sentosa. Gapoktan Margo Rukun terdiri atas 7 kelompok serta beranggotakan 400 orang. Gapoktan Harapan Sentosa beranggotakan 273 orang dari 9 kelompok. Jumlah Responden dari kelompok tani Margo Rukun yaitu sebanyak 42 responden dan 47 responden dari kelompok tani Harapan Sentosa.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer berupa data karakteristik anggota kelompok gapoktan Margo Rukun, dan kelompok gapoktan Harapan Sentosa yaitu nama, umur, jenis kelamin, pendidikan formal/non formal, mata pencaharian utama, mata pencaharian sampingan, dan luas pengelolaan lahan. Data primer diperoleh dari hasil instrumen kuisisioner yang dibagikan ke anggota kelompok tani.
2. Data skunder yang mendukung penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka meliputi daftar anggota kelompok tani, keadaan umum penelitian antara lain: letak, keadaan fisik lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat serta keadaan lahan, peta lokasi dan peta lahan garapan petani. Data sekunder diperoleh dari monografi Pekon Datar Lebuay dan dari KPHL Batutegi serta hasil-hasil

penelitian atau catatan-catatan penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer terdiri dari dua metode, yaitu:

1. Wawancara, yang merupakan cara untuk memperoleh data dan informasi dari seseorang atau subjek yang diteliti (Puspita *et al.*, 2020). Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dengan bertanya kepada responden mengenai pemahaman mengenai tahap perencanaan program rehabilitasi, serta tingkat keikutsertaan kelompok gapoktan Margo Rukun, dan kelompok gapoktan Harapan Sentosa pada tahap perencanaan program rehabilitasi. Tanya jawab dalam proses wawancara dilakukan dengan memberikan instrument berupa kuisisioner mengenai program perencanaan rehabilitasi hutan.
2. Observasi atau pengamatan langsung, dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang kejadian nyata dalam lokasi penelitian (Uthami, 2016). Data sekunder diperoleh melalui metode pencatatan data yang berasal dari lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka. Studi Pustaka adalah metode yang dilakukan dengan mempelajari literatur – literatur terkait yang dapat membantu dalam penelitian ini.

3.3.4 Analisis Data

3.3.4.1 Identifikasi Tingkat Persepsi dan Partisipasi di Gapoktan Margo Rukun dan Gapoktan Harapan Sentosa

Dalam penilaian tinggi rendahnya partisipasi petani di kelompok tani Mandiri Lestari dan Harapan Sentosa petani terhadap program RHL dipergunakan variabel-variabel penelitian yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan

Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Variabel-variabel tersebut berupa beberapa kegiatan persiapan pelaksanaan RHL yaitu:

Penanaman RHL melalui kegiatan reboisasi atau penghijauan meliputi :

- a. (perencanaan) Persiapan penanaman
- b. Penyediaan bibit (jumlah dan jenis)
- c. Penanaman
- d. Pemeliharaan
 1. Persiapan pada kegiatan penanaman RHL meliputi :
 - a. Penyiapan kelembagaan
 - b. Penataan areal penanaman
 - c. Penyiapan sarana prasarana.
 2. Penyediaan bibit pada kegiatan penanaman RHL yang meliputi :
 - a. Pembuatan persemaian
 - b. Penyediaan benih
 - c. Penggunaan jenis tanaman.
 3. Tahapan penanaman meliputi :
 - a. Pembersihan lahan
 - b. Pembuatan/pengadaan patok jalur
 - c. Pembuatan jalur tanaman
 - d. Pembuatan dan pemasangan ajir
 - e. Pembuatan lubang tanaman
 - f. Pemberian pupuk dasar/tambahan media tanam
 - g. Distribusi bibit ke lubang tanaman dan penanaman.
 4. Pemeliharaan Tanaman pada kegiatan penanaman RHL meliputi :
 - a. Pemeliharaan tahun berjalan
 - b. Pemeliharaan
 - c. Pemeliharaan II.

3.3.4.2 Analisis Tingkat Persepsi dan Partisipasi

Tingkat persepsi dan partisipasi kelompok tani margo rukun dan harapan Sentosa dianalisis menggunakan analisis skala likert. Skala likert mempunyai

empat atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau rata-rata, dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. Penggunaan jumlah dari semua butir pertanyaan valid karena setiap butir pertanyaan adalah indikator dari variabel yang direpresentasikannya (Budiaji, 2013). Menurut Wahyono (2009) rentang skor yang digunakan dalam persepsi dan partisipasi dijabarkan dalam table berikut.

Tabel 2. Kategori skor dalam tingkat persepsi perencanaan rehabilitasi hutan

No.	Rentang skor	Kategori
1	4	Sangat Setuju
2	3	Setuju
3	2	Tidak Setuju
4	1	Sangat tidak setuju

Tabel 3. Kategori Skor dalam tingkat partisipasi perencanaan rehabilitasi hutan

No.	Rentang Skor	Kategori
1	4	Sangat Sering
2	3	Sering
3	2	Jarang
4	1	Tidak Pernah

Data penelitian diperoleh melalui instrumen penelitian berupa kuesioner berisi pertanyaan yang dikembangkan dari variabel-variabel penelitian. Agar data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka instrumen penelitian diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya.

- a. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya butir kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila tiap butir pertanyaan atau pernyataan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi ($r > 0,3$) (Sugiyono, 2017). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki nilai $r > 0,3$.
- b. Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas instrumen diuji dengan menggunakan metode Cronbach's alpha. Kriteria suatu instrument

penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik Cronbach's alpha, bila koefisien reliabilitas (r_{total}) $> 0,6$ (Sugiyono, 2017).

3.3.4.3 Analisis Tingkat Korelasi Antara Persepsi dan Partisipasi di Gapoktan Margo Rukun dan Gapoktan Harapan Sentosa

Analisa data terkait dengan korelasi antara persepsi masyarakat (variabel X) dengan partisipasi masyarakat (variabel Y) dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik analisa korelasi. Teknik statistik yang digunakan yaitu korelasi Rank Spearman. Analisis korelasi ini digunakan untuk mencari korelasi variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dengan data berbentuk ordinal. Apabila kenaikan persepsi masyarakat (variabel X) selalu disertai dengan kenaikan partisipasi masyarakat (variabel Y) maka terdapat hubungan yang positif. Sebaliknya, apabila kenaikan variabel X disertai dengan penurunan variabel Y atau penurunan variabel X disertai kenaikan variabel Y maka hubungan tersebut adalah hubungan negatif (Sugiono, 2015).

3.3.4.4 Analisis Pengaruh Karakteristik Responden dengan Tingkat Persepsi dan Partisipasi.

Pengaruh karakteristik responden terhadap tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan rehabilitasi hutan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel independen yang digunakan yaitu karakteristik responden, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat persepsi dan partisipasi. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis, yaitu uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen di dalam model yang terbentuk berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan pada penelitian ini yaitu.

1. Tingkat persepsi petani kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa terhadap perencanaan rehabilitasi hutan tinggi. Jumlah skor tertinggi pada kategori pendapat sangat setuju tingkat persepsi Margo Rukun, yaitu sebesar 942. Selanjutnya pada Kelompok Tani Harapan Sentosa, skor tertinggi juga diperoleh dari kategori sangat setuju dengan jumlah skor 1997. Hal ini sejalan dengan hasil observasi bahwa pihak PT Nestle melibatkan masyarakat dalam perencanaan program rehabilitasi hutan.
2. Tingkat partisipasi perencanaan program rehabilitasi hutan oleh kelompok tani Margo Rukun dan Harapan Sentosa memiliki nilai yang tinggi. Kelompok tani Margo Rukun memiliki skor tertinggi dengan kategori sangat sering yaitu 1008. Selanjutnya kelompok tani Harapan Sentosa memiliki skor tertinggi 1292 dengan kategori sangat sering. Skor tertinggi diperoleh 2 KTH tersebut karena kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengimplementasikan konsep – konsep yang diberikan oleh PT Nestle dalam perencanaan program rehabilitasi hutan.
3. Tingkat persepsi dan partisipasi petani Margo Rukun memiliki korelasi yang tinggi dan bernilai positif, sehingga keberhasilan perencanaan program rehabilitasi berjalan dengan baik. Kebalikannya, tingkat korelasi antara persepsi dan partisipasi petani Harapan Sentosa memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan bernilai negatif namun masih mempengaruhi.

5.2. Saran

Pelaksanaan program RHL dalam tahap perencanaan perlu melibatkan peran masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan penting untuk dilaksanakan termasuk dalam program RHL terutama dalam pembangunan HKM. Melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu hal penting dalam tahap perencanaan program RHL. Proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam program RHL perlu dilaksanakan melalui pendampingan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta secara berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., Dharmawan, A.H., Putri, E.I.K. 2017. Kontribusi hutan nagari pada struktur nafkah dan ekonomi pedesaan: Studi kasus di Padang Pariaman. *Sodality. Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 5(2): 138- 147.
- Akhmaddhian, S., Fathanudien, A. 2015. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten konservasi. *Jurnal Unifikasi*. 2(1): 67 – 90.
- Alizamar, Couto, N. 2016. *Psikologi persepsi dan desain informasi : sebuah kajian psikologi persepsi dan prinsip kognitif untuk kependidikan dan desain komunikasi visual*. Media Akademi. Jakarta. 440p.
- Amir. 2014. Uji Karakteristik Curah Hujan dan Debit Pengairan Sungai Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *Jurnal Forum Bangunan*. 12(2) : 47-55.
- Amirudin, Z. 2014. Pengembangan model corporate social responsibility berbasis two way communication dalam rangka meningkatkan mutu community relation (studi pada pt. Nestle kejayan pasuruan dan masyarakat sekitar perusahaan). *Jurnal Humanity*. 9 (2) : 85 – 96.
- Anwas, O.M. 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Buku. Alfabeta. Bandung. 212p.
- Arif, A. 2016. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie*. 3(1): 33-41.
- Sudomo, A. 2012. *Penelitian tingkat partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (studi kasus di desa cisaga, kecamatan cisaga, Kabupaten ciamis, provinsi jawa barat)*.
http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sains_teknologi/article/download/834/pdf . Diakses Sabtu,1 Januari 2022 pukul 14.00.
- Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah. 2017. *Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli*.
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi->

[konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10.](#)

Diakses Jumat, 4 Februari 2022 pukul 13.00.

- Batari, A., Yusran, Y., Sahide M.A.K. 2017. Analisis tingkat keaktifan pengelolaan hutan desa labbo. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9 (1): 54-60.
- Budiaji, W. 2013. Skala pengukuran dan jumlah respon skala likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*. 2(2) : 125 – 131.
- Dani, A.A.H., Apriyanto. 2019. Penandaan Batas Area Perhutanan Sosial pada Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2 (1) : 30 – 37.
- Dewi, I.N., Awang, S.A., Andayani, W., Suryanto, P. 2018. Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (hkm) Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 12 : 86 – 98.
- Dewinta, R.A., Nurmayasari, I., Sadar, S. 2018. Persepsi anggota kpph terhadap pengelolaan tahura di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *JIIA*. 6(3):334-340.
- Eckert, S., Ratsimba, H.R., Rakotondrasoa, L.O., Rajoelison, L.G., Ehrensperger, A. 2012. Deforestation and forest degradation monitoring and assessment of biomass and carbon stock of lowland rainforest in the Analanjirofo region, Madagascar. *Forest Ecology and Management*. 262(11): 1996 – 2007.
- Fisu, A.A., Marzaman, L.U. 2018. Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1): 125 – 136.
- Frese, M., Gielnik, M.M. 2014. The psychology of entrepreneurship. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*. 1(1): 413-438.
- Geist, H.J., Lambin, E.F. 2012. Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation. *BioScience*. 52(2) : 143–150.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Buku. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 490p.
- Gilmour, D. 2016. *Forty years of community-based forestry a review of its extent and effectiveness*. Buku. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Roma. 168p.

- Hamilton, W., Bosworth, G., Ruto, E. 2015. Entrepreneurial younger farmers and the “young farmer problem” in England. *Agriculture and Forestry*. 61(4): 61- 69.
- Hasanah, E. U., Widowati, P. 2012. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri Rumah Tangga Krecek di Kelurahan Segoroyoso. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 2 (2) : 169-182.
- Heryatna, D. Zainal, S., Husni, H. 2015. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan kemasyarakatan di Desa Merangun Kec. Nanga Taman Kab. Sekandau. *Jurnal Hutan Lestari*. 4(1):58–64.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Buku. Rajawali Pers. Jakarta
- Irawan, A. Iwanuddin, J. Halawne, E., Ekawati, S. 2017. Analisis persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan kawasan kphp Model Poigar (perception and behavior analysis of community to the existence of poigar pfm model). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. 14(1):71-82.
- Jatmiko, A., Sadono, R., Rahayu, L. W. F. 2012. Evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan analisis multikriteria (studi kasus di desa butuh kidul kecamatan kalikajar, kabupaten wonosobo, jawa tengah). *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 6 (1) : 30 – 44.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A., Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*. 36 (3): 250-263.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Akses Kelola Perhutanan Sosial*. Link : <https://www.menlhk.go.id/site/post/130>. Diakses pada Senin, 3 Februari 2022 pukul 10.00
- Kurniawan, A., Hidayat, J.W., Amirudin, A. 2020. Partisipasi Masyarakat: Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Hutan Rakyat. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020, Palembang 20 Oktober 2020 “Komoditas Sumber Pangan untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan di Era Pandemi Covid -19”*. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang. 93 – 102.
- Kristin, Y., Qurniati, R., Kaskoyo, H. 2018. Interaksi Masyarakat sekitar Hutan terhadap Pemanfaatan Lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Jurnal Sylva Lestari*. 6 (3) : 1-8.

- Kurniati, D. 2015. Perilaku petani terhadap risiko usahatani kedelai di kecamatan jawai selatan kabupaten sambas. *Jurnal Social Economic of Agriculture*. 4 (1) : 32 – 36.
- Larasati, A. P. 2021. Peran kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*. 4 (1) :39-47.
- Lufti, A.A.M., Supriono, B. 2014. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten bogor. *Journal Nusa Sylva*. 14 (1) : 32-42
- Mamuko, F., Walangitan, H.,Tilaar, W. 2016. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten bolaang mongondow timur. *Jurnal Eugenia*. 22 (2): 80 – 92.
- Masria, Golar, dan Ihsan, M. 2015. Persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Kabuan Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*. 3(2):57–64.
- Ma'ruf, A. 2019. Kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam kebijakan kemitraan kehutanan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*. 25 (1) : 30 – 45.
- Miranda, A., Lumangkun, A., Husni, H. 2015. Analisa pendapatan petani karet dari hutan tanaman rakyat di trans sp 1 desa pangmilang kecamatan singkawang selatan kota singkawang kalimantan barat. *Jurnal Hutan Lestari*. 3 (4) : 517 – 525.
- Merino, L. 2016. *Environmental Governance in Latin America*. Buku. Palgrave Macmillan. London. 347p.
- Mufidah, A. D., Adi, I. R. 2018. Pemberdayaan masyarakat oleh pt nestle indonesia melalui kelompok tani ternak sapi perah budi luhur. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. 19(2): 109-131
- Murti, H. A. 2018. Perhutanan sosial bagi akses keadilan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*. 2 (2) : 62 – 75.
- Mulyawan, R. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Buku. Unpad Press. Bandung. 194p.
- Nandini, R. 2013. Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksidan hutan lindung di pulau lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 10 (1) : 43 – 55.
- Nazarudin N, Anwarudin O. 2018. Pengaruh penguatan kelompok tani terhadap partisipasi dan motivasi pemuda tani pada usaha pertanian di leuwiliang, bogor. *Jurnal Agribisnis Terpadu*. 12(1): 1-14.

- Nchor, A.A, Asuk, S.A. 2018. Perception of the status of iko-esai community forest, Akamkpa Local Government, Cross River State, Nigeria. *Journal of Advances in Research*. 17(5):1-10.
- Noor, U. M. 2020. Persepsi penerapan wajib militer guna meningkatkan pendidikan bela negara. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*. 3 (1) : 61 - 70
- Noor, M. 2014. Penanggulangan kemiskinan di indonesia (studi tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di kota semarang). *Jurnal Serat Acitya*. 3 (1) : 130 – 141.
- Novayanti, D., Banuwa, I.S., Safe'i, R., Wulandari, C., Febryano, I. G. 2017. Analisis faktor-faktor yang berkorelasi dengan persepsi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat pada kph Gedong Wani. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9(2):61-74.
- Nugroho, S.K., Juita, N.R., Kifli, F.W. 2018. Keadaan sosial ekonomi petani tebu di Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Jurnal Masepi*. 3(2): 1 – 21.
- Nurhaedah, M., Hapsari E. 2014. Hutan desa kabupaten bantaeng dan manfaatnya bagi masyarakat. *Info Teknis EBONI*. 11 (1) : 27 – 36.
- Nurhasikin. 2013. Penduduk usia produktif dan ketenagakerjaan. <http://kepri.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=144>. Diakses Senin, 3 Januari 2022 pukul 11.00.
- O'brien, D. 2014. *The Epistemology of Perception*. <http://www.iep.utm.edu/epis-per/>. Diakses pada Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 14.00.
- Palumpun, K., Massiri, D, S., Anwar, Maiwa, A. 2020. Dukungan masyarakat terhadap perencanaan rehabilitasi hutan diwilayah kesatuan pengelolaan hutan (kph) kulawi di desa wawujai kecamatan marawola barat kabupaten sigi provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Warta Rimba*. 8 (4) : 326 – 332.
- Purnomo, E.P., Anand, P.B. 2014. The Conflict of Forest Tenure and the Emergence of Community Based Forest Management in Indonesia. *Journal of Government and Politic*. 5(1) : 20 – 31.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., Banuwa, I. S. 2017. Aspek sosial ekonomi pada sistem agroforestri di areal kerja hutan kemasyarakatan (hkm) kabupaten lampung barat, provinsi lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5 (3) : 95 – 103.
- Puspita, N. T., Qurniati, R., Febryano, I. G. 2020. Modal sosial masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di kesatuan pengelolaan hutan Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*. 8(1): 54-64.

- Putra, H. J. 2015. *Persepsi dan Perilaku Perambah Hutan Terhadap Rencana Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (DI KPHL Selagai Lingga Register 39 Kabupaten Lampung Tengah)*. Thesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Putra, T.G. 2015. Peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan umkm manik-manik kaca di kabupaten jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 3 (1) : 1 – 10.
- Rahayu, E.M., Triwanto, J. 2021. Penyuluhan perhutanan sosial di kelompok tani hutan kota malang. *Jurnal BUDIMAS*. 3 (2) : 545 – 549.
- Rahmina. 2012. *Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang – Undang No. 41 Tahun 1999*. Buku. Sunset Media. Jakarta. 43p.
- Reski, N.A., Yusran, Y., Makkarennu, M. 2017. Rancangan pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) desa pacekke, kecamatan soppeng riaja, kabupaten baru, sulawesi selatan. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*. 9(1): 37-43.
- Restrepo, J D., Kettner, A.J., Syvitski, J.P.M. 2015. Recent deforestation causes rapid increase in river sediment load in the Colombian Andes. *Anthropocene*. 10 : 13-28.
- Sanjaya, R., Wulandari, C., Herwanti, S. 2017. Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di desa sindang pagar kecamatan sumberjaya kabupaten lampung barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 5 (2) : 30 – 42.
- Samuel, Z., Kpieta, A., Jasaw, G.S. 2012. Promoting community-based extension agents as an alternative approach to formal agricultural extension service delivery in Northern Ghana. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*. 2(1):76–95.
- Sinukaban, N. 2017. *Conservation Fanning Systems for Sustainable Development in Java, Indonesia. Soil and Water Conservation in Sustainable Development*. Dirjen RLPS. Bogor.
- Suhardjito, D., Wulandari, C. 2019. A reflection of social forestry in 2019: towards inclusive and collaborative government approaches. *Jurnal Forest and Society*. 3(1): 137 – 140p.
- Sulistiyowati, W. Astutu, C. C. 2017. *Statistika Dasar Konsep dan Aplikasinya*. Buku. Umsida Peress : Sidoarjo. 226p.

- Susilo, S., Nairobi. 2019. Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. *Jurnal ISEI*. 3 (1) : 16 – 27.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Buku. Alfabeta. Bandung. 334p.
- Supranto, J. 2018. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Buku. Erlangga : Jakarta . 380p.
- Syamsuddin, W. D. 2021. Partisipasi masyarakat terhadap pembentukan hutan desa kalao di kota tidore kepulauan. *Jurnal Akrab Juara*. 6 (5) : 130 – 143.
- Tadesse, S. A, dan Teketay, D. 2017. Perceptions and attitudes of local people towards participatory forest management in tarmaber District of North Shewa administrative zone, Ethiopia: the case of wof-washa forests. *Journal of Ecoogical Process*. 6(17):1-16.
- Tangkilisan, H. N. S. 2015. *Manajemen Publik*. Buku. PT Grasindo : Jakarta. 345p.
- Tangngareng, T., Ridha, M. 2016. Pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) di desa bukit indah, bulukumba: batasan dan kemungkinan. *BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertahanan*. 2 (2) : 194 – 208.
- Tunggal, A. W. 2018. *Dasar Dasar Customer Relationship Management*. Buku. Harvarindo : Jakarta. 99p.
- Tuty D. W. N., Widiyanti E., dan Utami B. W. 2017. Korelasi faktor pembentuk persepsi dengan persepsi konsumen terhadap media pemasaran online. *Journal of Sustainable Agriculture*. 32(2):108-115.
- Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., Nirmawati. 2019. Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia di desa cempa kecamatan enrekang kabupaten enrekang. *Jurnal MODERAT*. 5 (2) : 1 – 17.
- Ukkas, I. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja industri kecilkota palopo. *Journal of Islamic Education Management*. 2 (2) : 187 – 198.
- Uthami, A. 2016. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat (Studi Pada Warga Penerima Program CSV Nestle di RT 13 & 14 Desa Sukamanjur, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Lampung.

- Warjio. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*. 2 (2) : 116 -145.
- Wahyono, T. 2009. *25 Model Analisis Statistik dengan SPSS 17*. Buku. PT Elex Media Komputindo : Jakarta. 316p.
- Walangitan, H.D. 2012. Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berbasis kemampuan lahan di daerah tangkapan air (DTA) danau tondano. *Jurnal Wasian*. 1(2): 45 – 56.
- Walhi. 2014. *Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2014: Politik 2014, Utamakan Keadilan Ekologis*. <http://www.walhi.or.id/tinjauan.pdf>. Diakses pada 5 Februari 2022.
- Wibisono, Y. 2015. *Metode Statistik*. Buku. Gajah Mada University Press : Yogyakarta. 728p.
- Wulandari, C. 2010. Studi persepsi masyarakat tentang pengelolaan lanskap agroforestri di sekitar sub DAS Way Besai, Provinsi Lampung. *Jurnal Pertanian Indonesia*. 15(3):137-140.
- Wulandari, C., Bintoro A., Rusita, Santoso, T., Duryat, Kaskoyo, H., and Budiono, P. 2018. Community Forestry Adoption Based on Multipurpose Tree Species Diversity Towards to Sustainable Forest Management in ICEF of University of Lampung, Indonesia. *Biodiversitas*. 19(3): 1102-1109.
- Wulandari, C., Budiono, P., Ekayani, M. 2019. Impacts of the new Decentralization Law 23/2014 to the implementation of Community Based Forest Management in Lampung Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. doi:10.1088/1755-1315/285/1/012006
- Yitnosumarto. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku. Graha Ilmu.Yogyakarta. 286p.
- Yuliara, I. M. 2016. *Modul Regresi Linear Berganda*. Modul. Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Badung.